



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DAFIK**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **465532**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.285.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 776 m2/450 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/300 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/100 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/140 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/150 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/150 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 7.663 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
8. Tanah Seluas 698 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
9. Tanah Seluas 2.037 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 385.000.000



1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 299.318.163

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.990.818.163

III. HUTANG Rp. 839.569.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.151.249.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.